



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

PROFIL PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

- 1 Kode Perangkat Daerah** : 2.17.0.0.0.0.01
- 2 Nomenklatur Perangkat Daerah** : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 3 Urusan** : Bidang Urusan Perkoperasian Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 4 Sejarah Dinas**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 07 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2011 kembali dilakukan penyempurnaan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 06), adapun Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi diatur melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Pada tahun 2022 kembali dilakukan penyempurnaan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 42 tahun 2022 Tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan urusan koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah.

5 Tempat dan Kedudukan

- 5.1 Alamat** : Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung I Lt 2
Jl. Maruga Raya, No. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
- 5.2 Nomor Telepon** : +62812-1080-7750
- 5.3 Faximil** : -
- 5.4 E-mail** : dinkop@tangerangselatan.com
- 5.6 Website** : <https://dinkopukm.tangerangselatankota.go.id/>
- 5.7 Medial Sosial** : Instagram @dinkop.ukmtangsel

6 Visi dan Misi**Visi**

**"TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI"**

Misi

Dinas mengampu satu/dua/tigas misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi”.**
- 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing**
- 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan**

7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, adapun kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur melalui Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

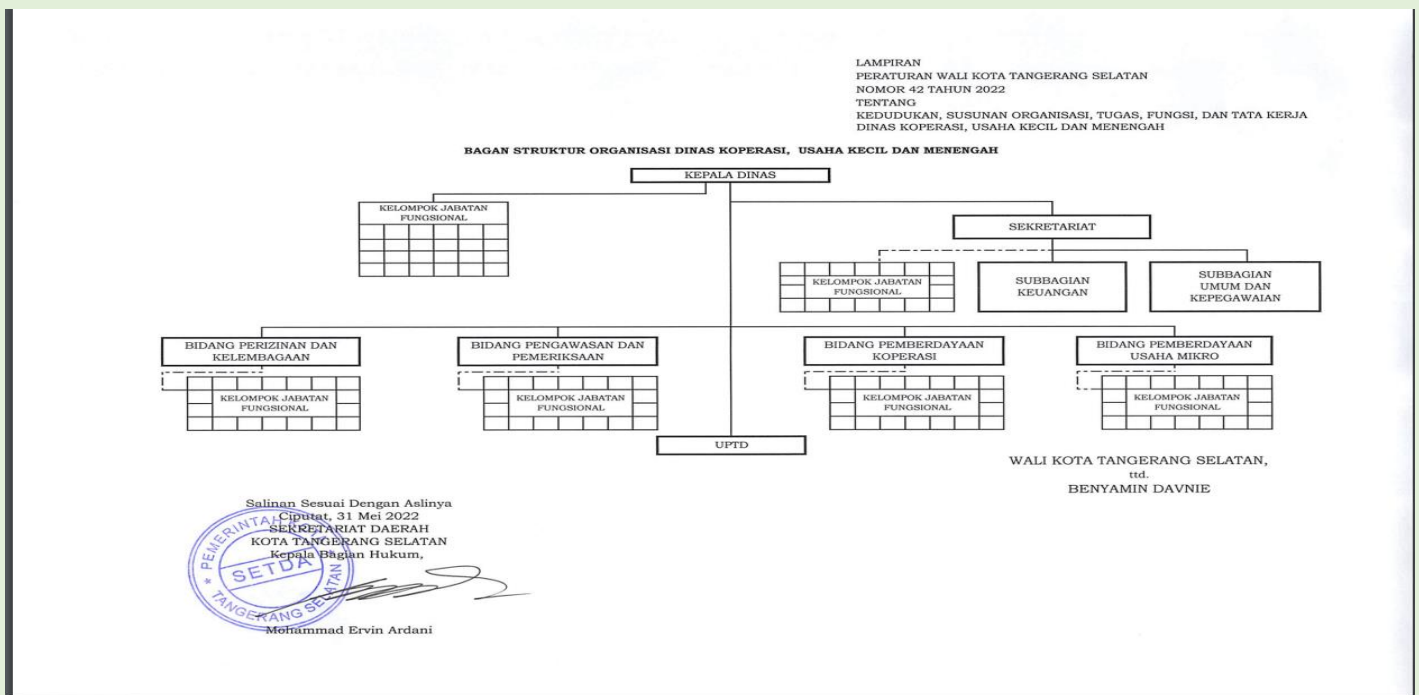
- | | |
|------------------|---|
| 7. 1 Tugas Dinas | : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. |
| 7.2 Fungsi Dinas | <ol style="list-style-type: none">a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;b. Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;c. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil, dan memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;d. Penyusunan, perumusan, dan penjabaran kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;e. Pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis dalam pemberian bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;f. Pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian teknis atas penyelenggaraan bimbingan di bidang perkoperasian dan usaha mikro kecil serta memfasilitasi pembiayaan promosi dan informasi usaha;g. Pelaksanaan pelayanan fasilitator dengan pihak-pihak instansi pemerintah terkait, BUMN dan swasta dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah; |

- h. Pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan, umum, dan administrasi kepegawaian serta keuangan.

8 Struktur Organisasi Dinas

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas Sekretaris Dinas, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan, dan
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas



9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan terdiri dari dukungan pegawai berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai ASN dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3
PNS	10	21
Non PNS	43	25
Jumlah (%)	53	46

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Status	Golongan/Ruang	Jumlah
1	2	3
Pembina Utama Muda	IV c	1
Pembina Tki	-	-
Pembina	IV a	8
Penata Tk I	III d	6
Penata	III c	6
Penata Muda Tk 1	III b	1
Penata Muda	III a	5
Pengatur Tk 1	II d / II c	4

Gambar : Persentase SDM

10 Program

Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikutL

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

11 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja
	1	2	3
1	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja,
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja
6	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

7	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
8	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan terhadap publik
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunya Laporan Kinerja Keuangan dan neraca aset yang Optimal
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	

		Keuangan SKPD		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		Penyediaan dan Peralatan Kantor		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
		Penyediaan Jasa		

		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya dan Terpeliharanya barang dan jasa perkantoran
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

12 Jenis Layanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pelayanan yang diselenggarakan di setiap di unit kerja di informasikan sebagai berikut:

Tabel :

Unit Kerja	Jenis Layanan
1	2
Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Keuangan lingkup Dinas 2. Pengelolaan Naskah dan Arsip Dinas 3. PPID Pembantu
Bidang Pemberdayaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian Koperasi 2. Penerbitan Izin Kantor Cabang Koperasi 3. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam 4. Klinik Konsultasi Koperasi 5. Penilaian Koperasi 6. Pendiidkan dan Pelatihan Perkoperasian 7. Bimbingan Teknis Lembaga Koperasi 8. Pendampingan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Bidang Perizinan dan Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi 2. Perlindungan Produk Koperasi dan UMKM 3. Akses Hibah bagi Lembaga Koperasi dan UMKM 4. Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM 5. Penataan Pedagang Kaki Lima 6. Revitalisasi Koperasi Serbuk 1 Koperasi 1000 UMKM
Bidang Pengawasan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi 3. Pendataan dan Pemutakhiran Data Koperasi dan UMKM 4. Bimbingan Teknis Ekonomi Kreatif 5. Pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif 6. Digitalisasi Data Koperasi dan UMKM (edc dan Sikopper)
Bidang Pemberdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan ,



an Usaha Mikro	kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan 2. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil 3. Penerbitan Label Halal 4. Penerbitan PIRT 5. Bimbingan Teknis UMKM Startup 6. Pendidikan dan Pelatihan Startup 7. Promosi Produk UMKM dalam dan luar Daerah 8. Perluasan Pangsa Pasar produk UMKM